



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/335/K/411.013/2022
TENTANG
PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang :
- a. bahwa penataan ketatalaksanaan merupakan salah satu area perubahan dalam reformasi birokrasi untuk mewujudkan struktur organisasi yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Nganjuk;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 03 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020;

Am.

9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2022;
10. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 18 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 10 Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK.**
- KESATU** : Menetapkan Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Nganjuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU** merupakan bagan yang digunakan untuk mengidentifikasi alur yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses bisnis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
- KETIGA** : Evaluasi dan revisi terhadap Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Nganjuk dilakukan secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 28 Oktober 2022

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


SUTRISNO, SH, M.Si.

Pembina

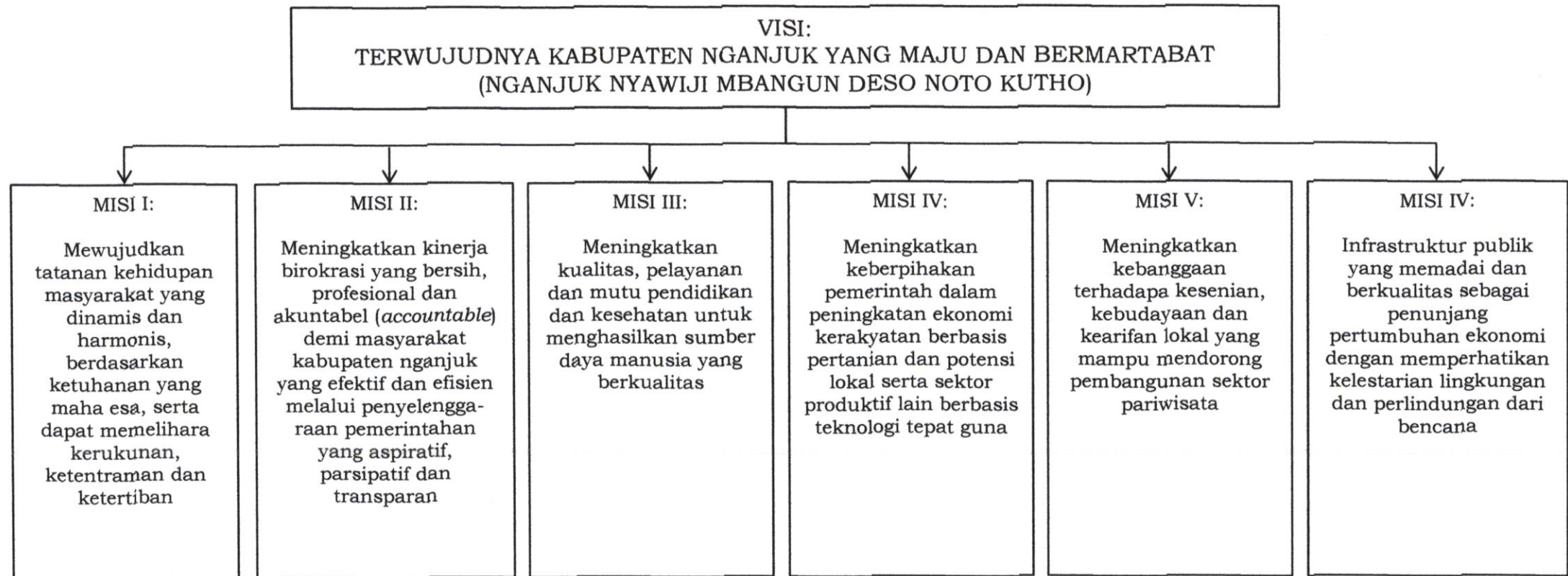
NIP. 19680501 199202 1 001

dh

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/335/K/411.013/2022
TENTANG PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

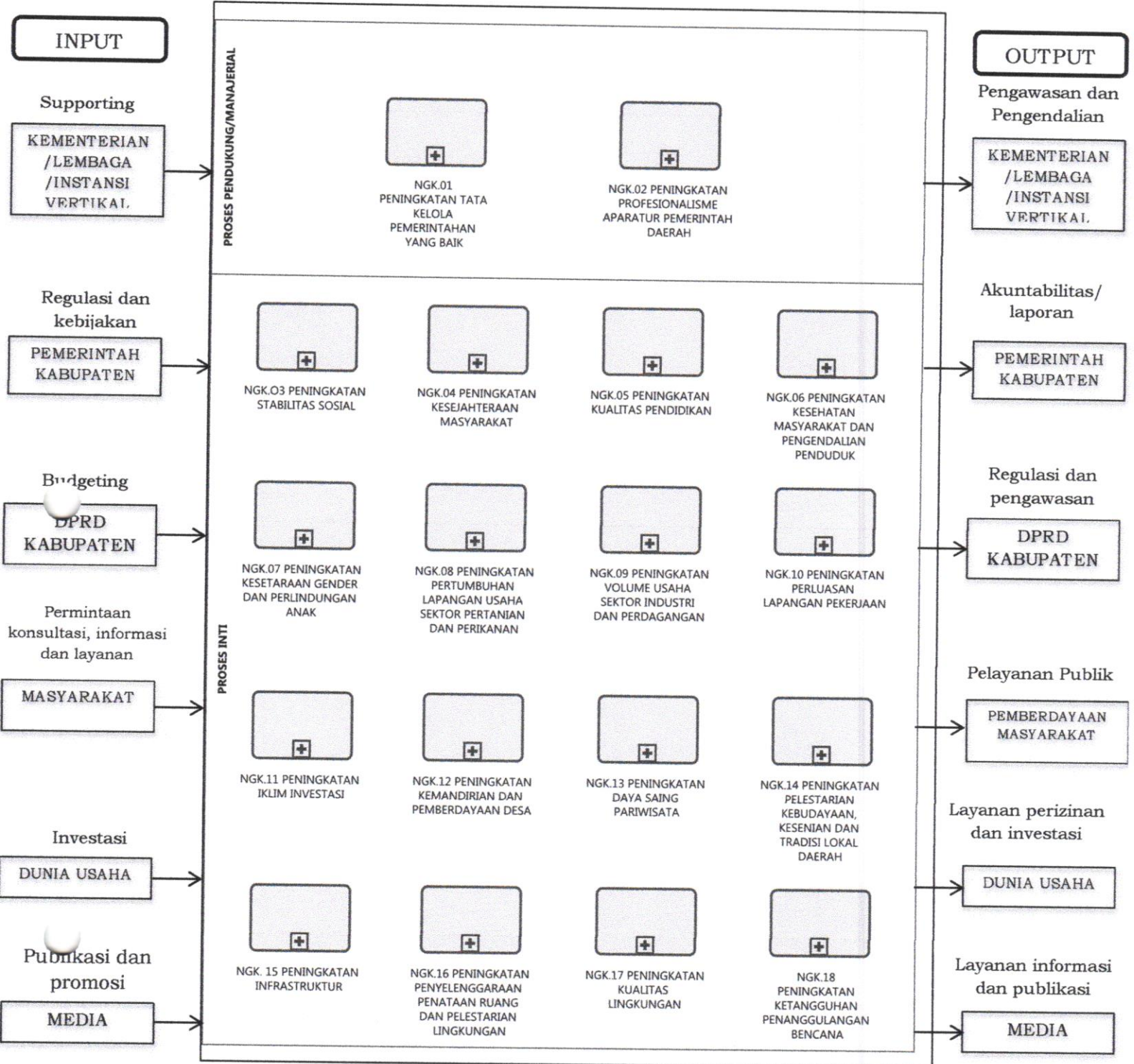
PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

A. VISI DAN MISI PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2018-2023



du

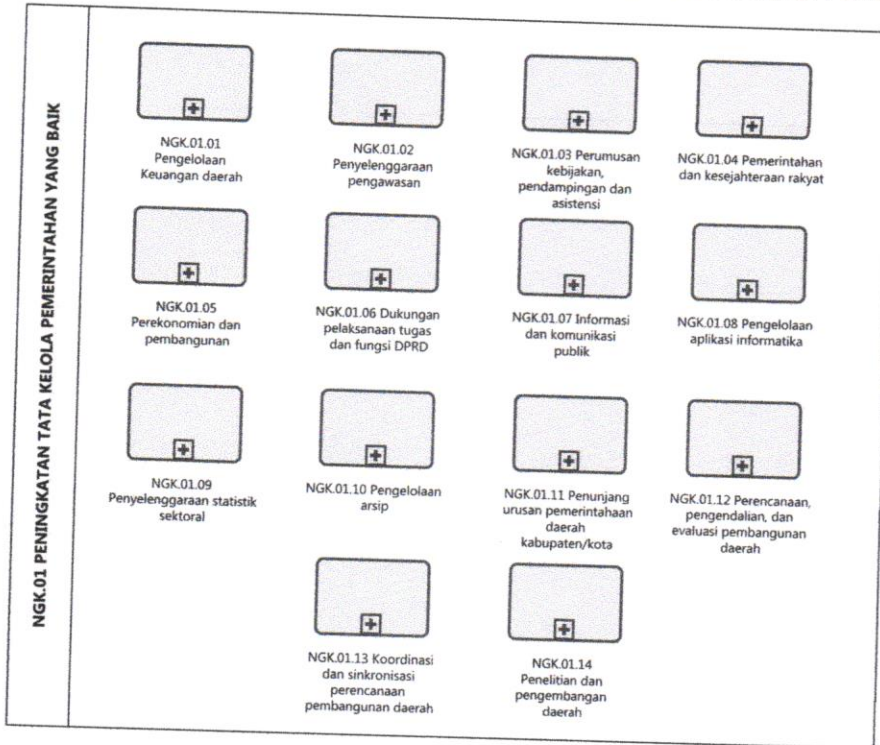
B. PETA PROSES BISNIS



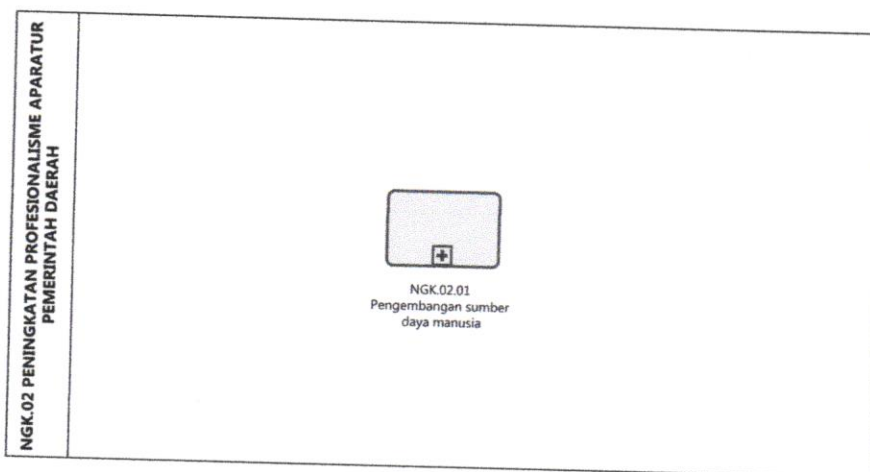
Handwritten signature

C. PETA SUB PROSES

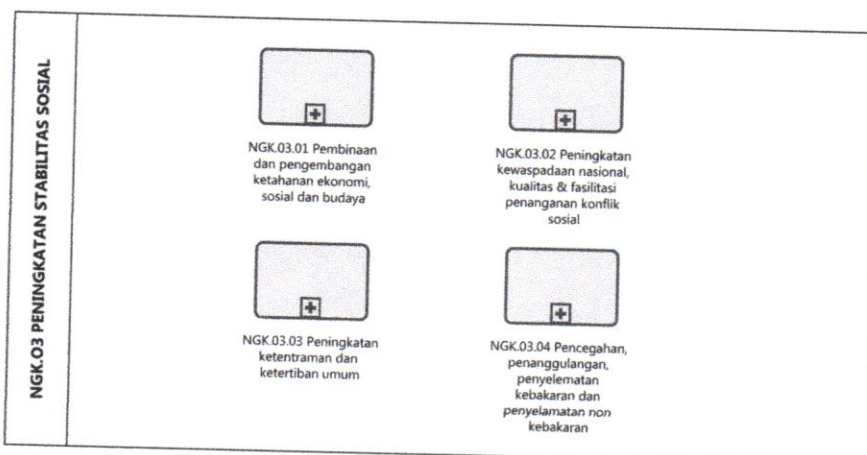
1. NGK.01 PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK



2. NGK.02 PENINGKATAN PROFESIONALISME APARATUR PEMERINTAH DAERAH

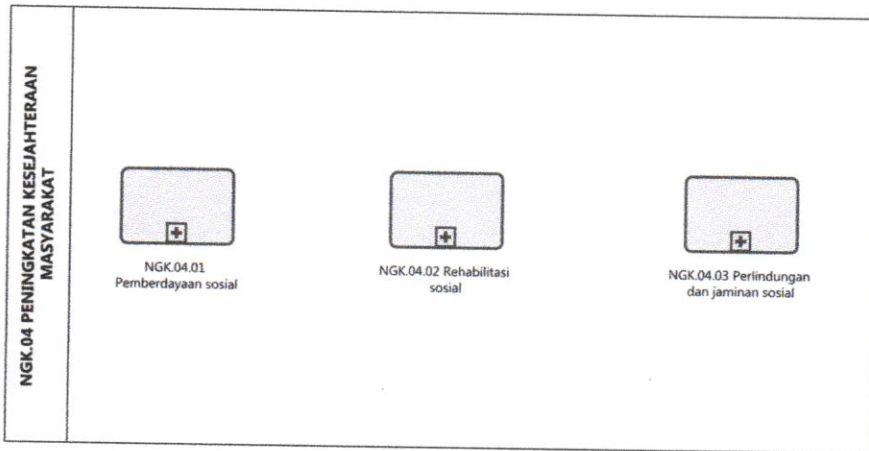


3. NGK.03 PENINGKATAN STABILITAS SOSIAL

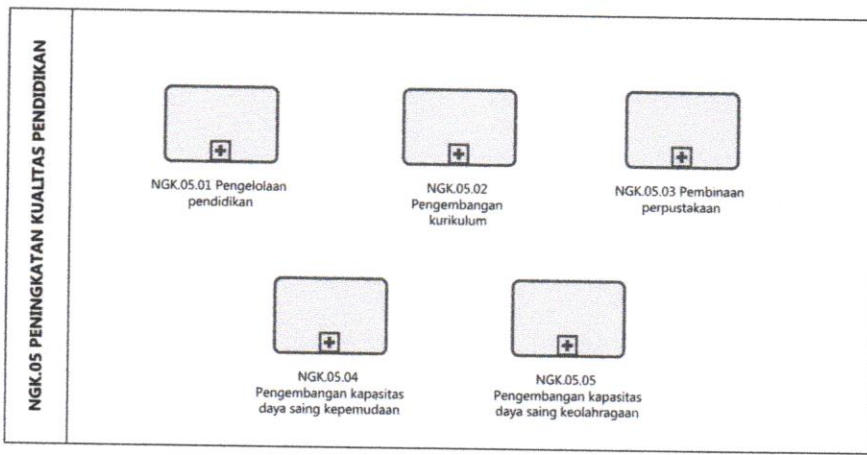


dl.

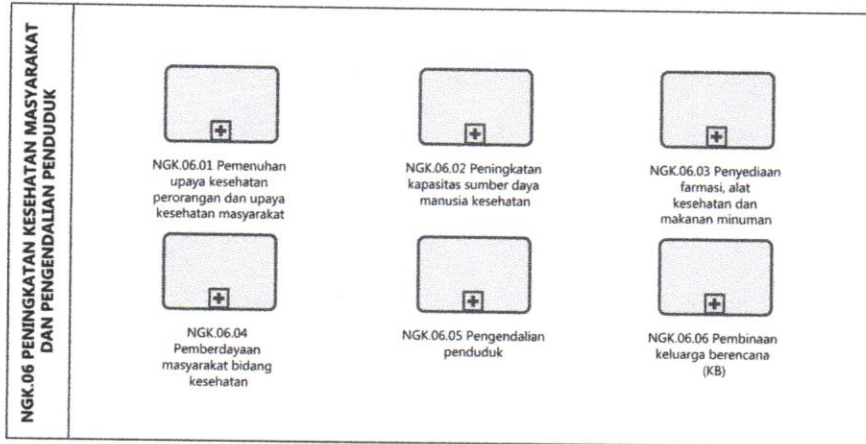
4. NGK.04 PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT



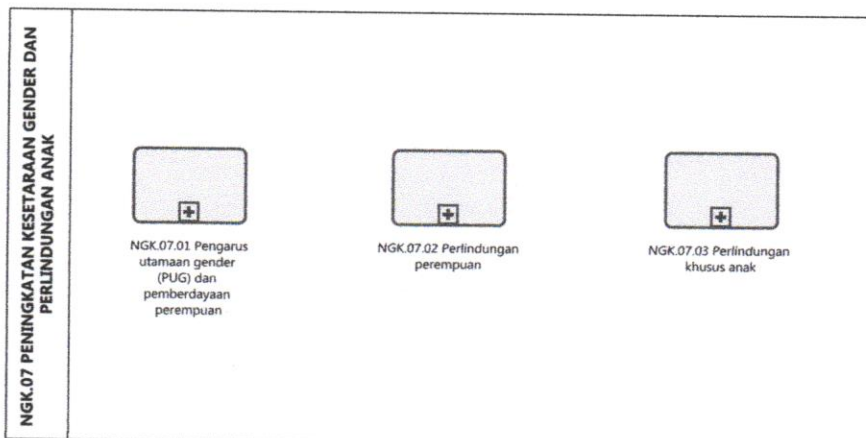
5. NGK.05 PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN



6. NGK.06 PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT DAN PENGENDALIAN PENDUDUK

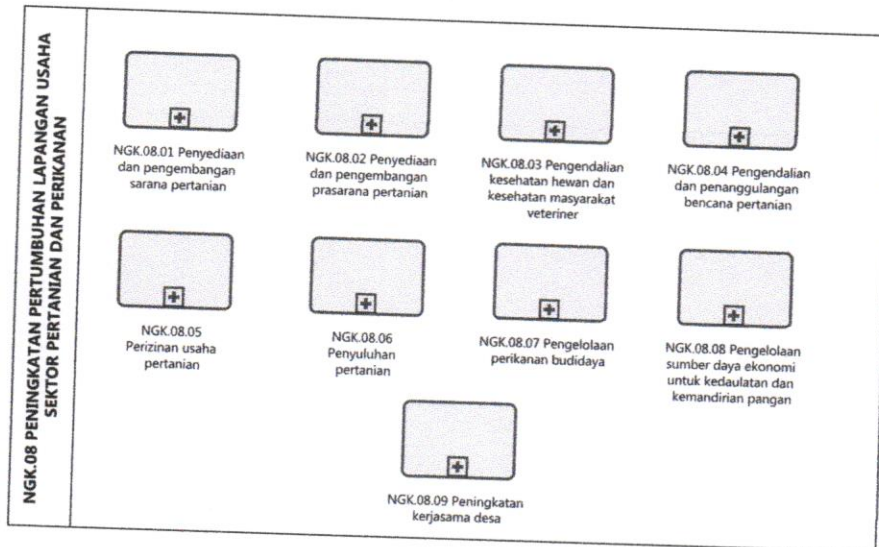


7. NGK.07 PENINGKATAN KESETARAAN GENDER DAN PERLINDUNGAN ANAK

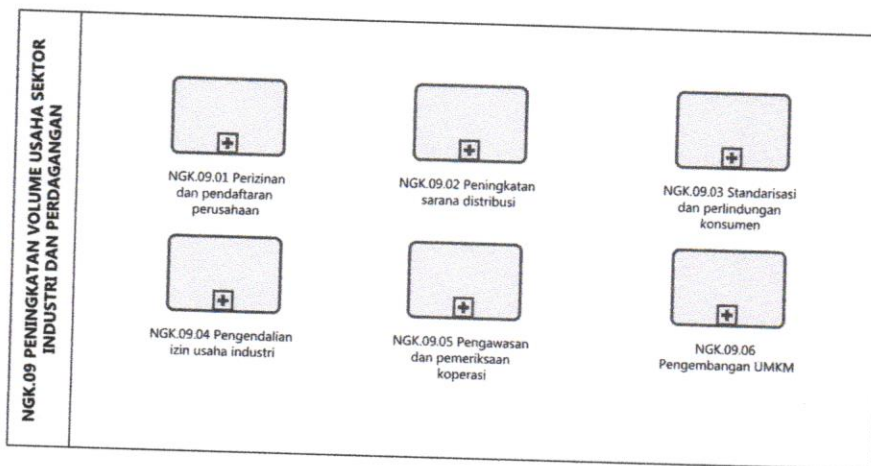


dm

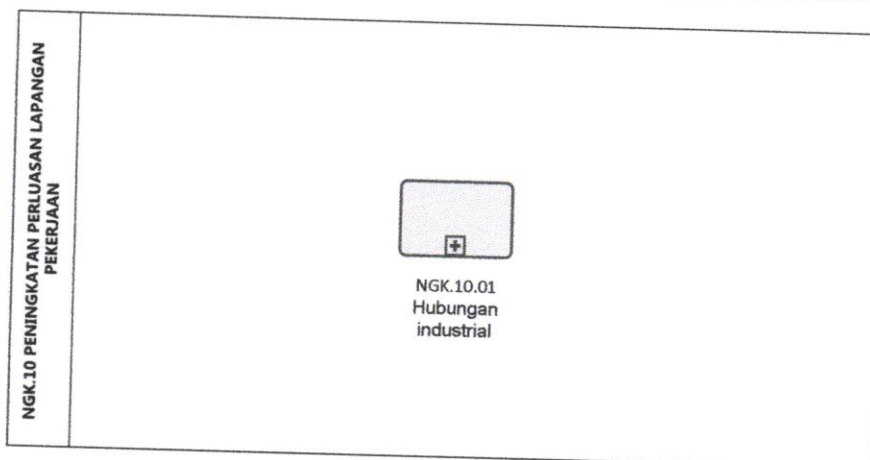
8. NGK.08 PENINGKATAN PERTUMBUHAN LAPANGAN USAHA SEKTOR PERTANIAN DAN PERIKANAN



9. NGK.09 PENINGKATAN VOLUME USAHA SEKTOR INDUSTRI DAN PERDAGANGAN

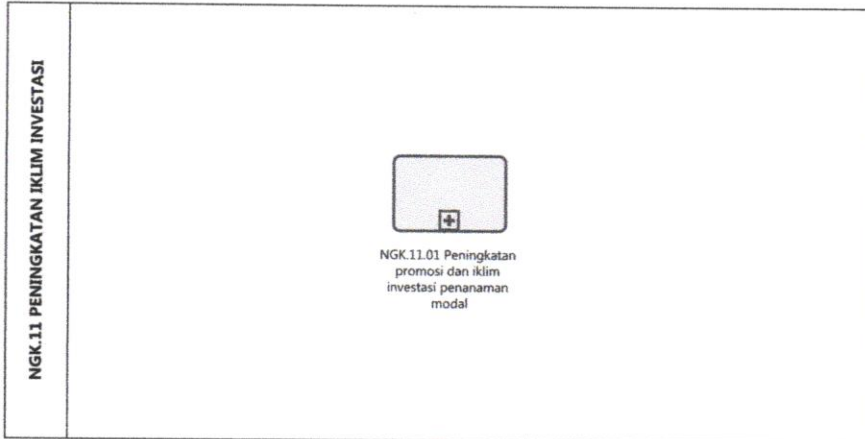


10. NGK.10 PENINGKATAN PERLUASAN LAPANGAN PEKERJAAN

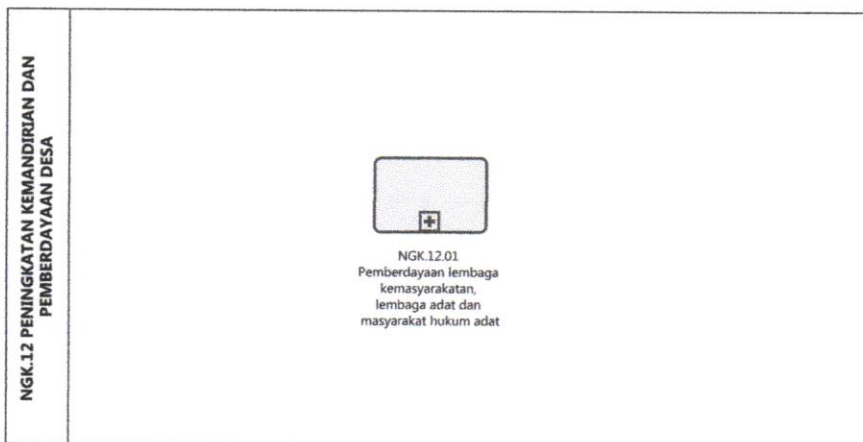


M

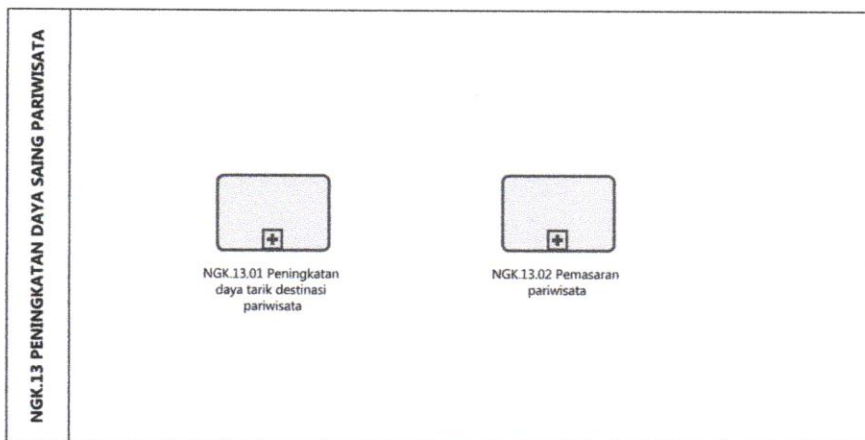
11. NGK.11 PENINGKATAN IKLIM INVESTASI



12. NGK.12 PENINGKATAN KEMANDIRIAN DAN PEMBERDAYAAN DESA

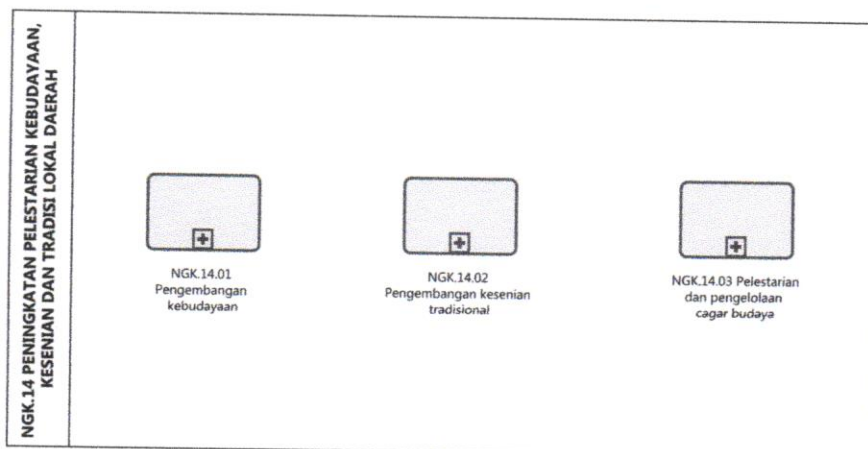


13. NGK.13 PENINGKATAN DAYA SAING PARIWISATA

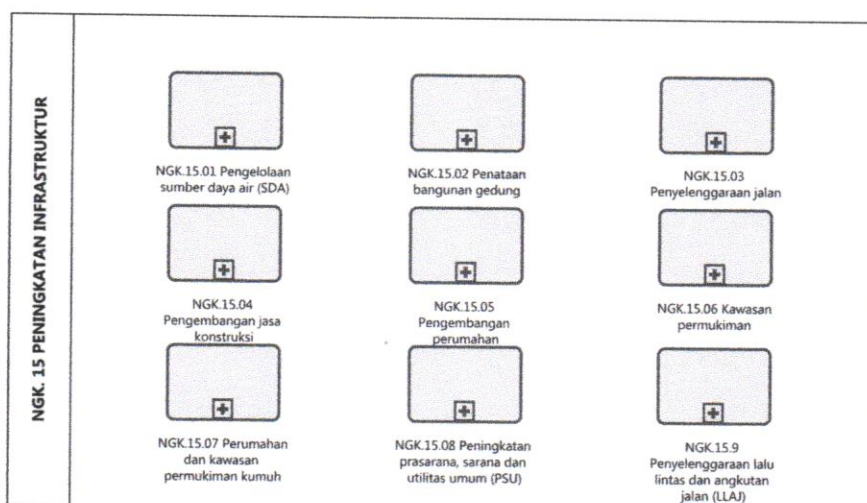


dh.

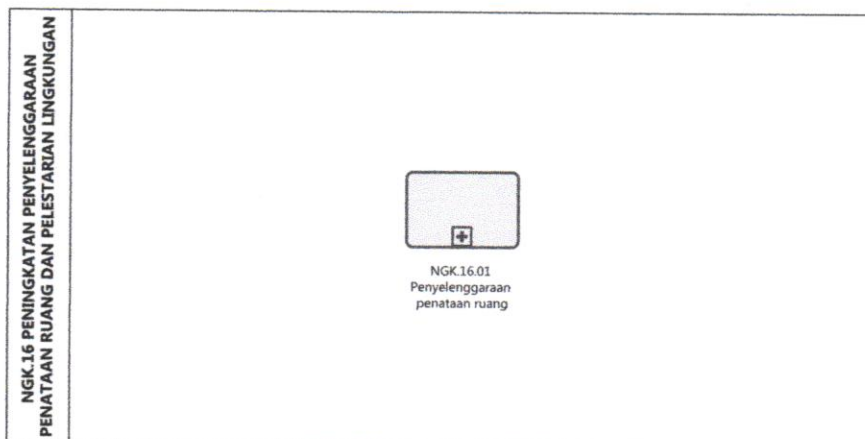
14. NGK.14 PENINGKATAN PELESTARIAN KEBUDAYAAN, KESENIAN DAN TRADISI LOKAL DAERAH



15. NGK.15 PENINGKATAN INFRASTRUKTUR

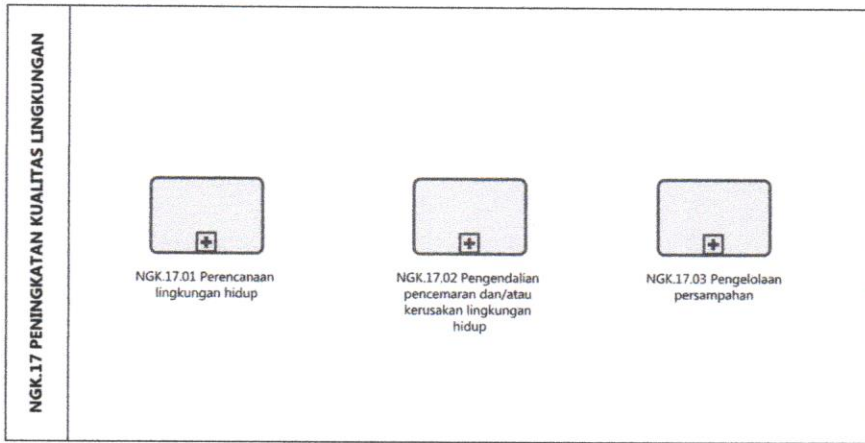


16. NGK.16 PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN

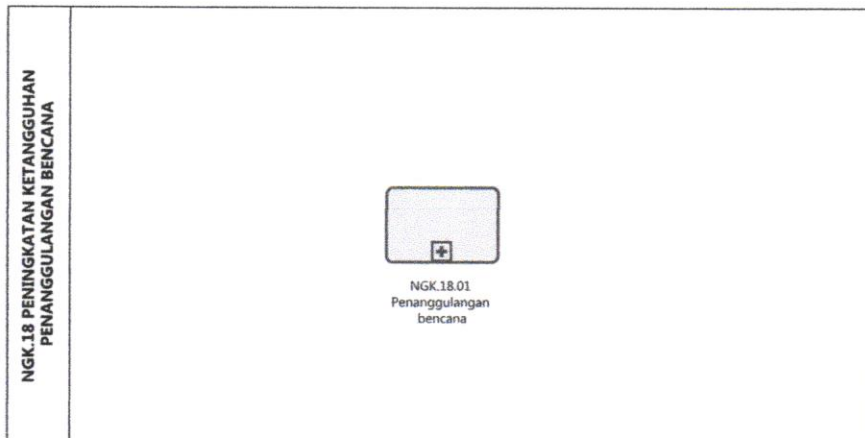


dh

17. NGK.17 PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN



18. NGK.18 PENINGKATAN KETANGGUHAN PENANGGULANGAN BENCANA



dh.

D. PETA RELASI

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK	PROSES MANAJERIAL/ PENDUKUNG	NGK.01 PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK		NGK.02 PENINGKATAN PROFESIONALISME APARATUR PEMERINTAH DAERAH								
		BPKAD	SETDA	DISKOMINFO		BKPSDM						
		INSPEKTORAT	SETWAN	DINAS ARPUS								
	BAPPEDA											
	PROSES INTI/UTAMA	NGK.03 PENINGKATAN STABILITAS SOSIAL		NGK.04 PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT		NGK.05 PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN		NGK.06 PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT DAN PENGENDALIAN PENDUDUK				
		BAKESBANGPOL	SATPOL PP	DINSOS PPPA		DISPENDIK	DINAS ARPUS	DINKES	DINAS PPKB			
		DINAS DAMKAR		NGK.08 PENINGKATAN KESETARAAN GENDER DAN PERLINDUNGAN ANAK		DISPORABUDPAR		NGK.10 PENINGKATAN PERLUASAN LAPANGAN PEKERJAAN				
		NGK.07 PENINGKATAN KESETARAAN GENDER DAN PERLINDUNGAN ANAK				DINSOS PPPA				DISPERINDAG	DINAS KOP UM	DISNAKER
		DIPERTA	DINAS KPP			DINAS PMD						
		NGK.11 PENINGKATAN IKLIM INVESTASI		NGK.12 PENINGKATAN KEMANDIRIAN DAN PEMBERDAYAAN DESA		NGK.13 PENINGKATAN KEMANDIRIAN DAN PEMBERDAYAAN DESA		NGK.14 PENINGKATAN PELESTARIAN KEBUDAYAAN, KESENIAN DAN TRADISI LOKAL DAERAH				
		DPMPSTP		DINAS PMD		DISPORABUDPAR		DISPORABUDPAR				
		NGK.15 PENINGKATAN INFRASTRUKTUR		NGK.16 PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN		NGK.17 PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN		NGK.18 PENINGKATAN KETANGGUHAN PENANGGULANGAN BENCANA				
		DINAS PUPR	DINAS PRKPP	DINAS PUPR		DINAS LH		BPBD				
		DISHUB										

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUTRISNO, SH, M.Si
Pembina
NIP. 19680501 199202 1 001

Ditetapkan di Nganjuk
Pada tanggal 28 Oktober 2022

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI